



PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

📍 Jl. Bimasakti No. 1
☎ (0274) 515876
🌐 lingkunganhidup.jogjakota.go.id
📱 dlh.kotayk
📠 dlh.kotayk

RENJA DLH 2026





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026**

**KOTA YOGYAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Yogyakarta, 2025

Plt. Kepala,

AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197203061996031004

DAFTAR ISI

JUDUL 1

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR TABEL 5

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 Latar Belakang..... 6

1.2 Landasan Hukum 7

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.3.1 Maksud..... 9

1.3.2 Tujuan..... 9

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta12

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 13

B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup..... 14

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)..... 16

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 17

E. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat..... 18

F. Program Pengelolaan Persampahan 19

G. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 21

H. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 25

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.. 43

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 46

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 49

2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 52

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 54

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 54

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta .58

3.3 Program dan Kegiatan 59

3.4 Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender yang Menyasar 5 Kelompok Rentan 67

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 69

BAB V_PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik Dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 26

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024..... 33

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2024 44

Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026..... 51

Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (untuk Perencanaan 2026) 53

Tabel 3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025 58

Tabel 3. 2 Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinaas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Lingknagan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
 13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026, diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 14 (lima belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 80.204.439.363,00 (delapan puluh miliar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan pergeseran setelah perubahan sejumlah Rp 124.871.354.051,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima puluh satu rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 93,45 persen dengan realisasi anggaran Rp 116.694.136.607,00 (seratus enam belas miliar enam ratus sembilan

puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah) atau sebesar 93,45 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dan Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup (PLH). Target kinerja program pada tahun 2024 untuk RPPLH adalah 50%, dengan realisasi program sebesar 75%, sehingga capaian kinerja program sebesar 150%. Sementara itu target kinerja program untuk KLHS adalah 66,67% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja 149,99%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 471.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 453.914.800,00 atau sebesar 96,37%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi dengan penyusun RPPLH dan KLHS berjalan lancar, sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah terdapat perubahan nomenklatur organisasi di Kementerian Lingkungan Hidup maka verifikasi RPPLH tidak dapat dilakukan di tahun 2024 dan belum ada yang pernah melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan (2) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 357.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 355.988.800,00 atau terserap 99,55 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 357.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 355.988.800,00 atau terserap 99,55 persen.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 113.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 97.926.000,00 atau terserap 86,31 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - a. Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 113.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 97.926.000,00 atau terserap 86,31 persen.

B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang dan 1 (satu) UPT, yaitu Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup (PLH), Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup, dan UPT Laboratorium Lingkungan. Target program pada tahun 2024 untuk indikator Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah 100%, realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100%. Sementara itu untuk indikator Persentase Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU sebesar 52,63%, realisasi sebesar 53,51% sehingga capaian kinerja sebesar 101,67%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.227.945.910 dengan realisasi sebesar Rp 3.184.685.246,00 atau sebesar 99,80 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah kegiatan pembersihan sampah sungai dilakukan oleh 60 petugas pembersihan sungai secara rutin di 4 Sungai Kota Yogyakarta sesuai dengan titik lokasi yang sudah ditentukan (67 titik lokasi

pembersihan), kegiatan inventarisasi sumber pencemar dilakukan dengan survey sumber pencemar dari IPAL dan drainase yang berada di bantaran Sungai di Kota Yogyakarta (39 titik sumber pencemar yang dipantau), bekerja sama dengan Laboratorium terakreditasi dan tenaga ahli dalam analisa hasil pemantauan, sehingga meningkatkan validitas hasil pemantauan kualitas lingkungan, sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah apabila terjadi kendala teknis di lapangan (alat mengalami trouble, cuaca tidak mendukung).

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan (3) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 767.278.651,00 dengan realisasi sebesar Rp 764,278,651,00 atau terserap sebesar 99,55 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 205,086,200,00 dengan realisasi sebesar Rp 203,614,516,00 atau terserap 99,28 persen.

b. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 562,638,970,00 dengan realisasi sebesar Rp 560,664,135,00 atau terserap 99,65 persen.

2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2,243,277,640,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,242,746,390,00 atau terserap 99,98 persen

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 216,943,100,00 dengan realisasi sebesar Rp 177,660,205,00 atau terserap 81,89 persen.

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau dan Capaian pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Target program pada tahun 2024 untuk indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau adalah 23,343%, realisasi program sebesar 23,351%, sehingga capaian kinerja program sebesar 100,03%, sedangkan target untuk indikator Capaian pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan adalah 61,6646% dengan realisasi sebesar 61,8325% (capaian 100,2722%). Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11,854,122,873,00 dengan realisasi sebesar Rp 11,735,739,643,00 atau sebesar 99,00 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program peningkatan yaitu pemenuhan target luasan RTH publik masih terus dilaksanakan. sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah resiko alih fungsi RTH cukup tinggi, banyaknya permohonan ijin penebangan pohon dan pemindahan taman yang akan mengurangi persentase RTH, regulasi yang kurang tegas dalam mengatur penggunaan RTHP dan juga mengenai ijin penebangan pohon di jalur hijau.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11,854,122,873,00 dengan realisasi sebesar Rp 11,735,739,643,00 atau terserap sebesar 99,00 %, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4,097,989,935,00 dengan realisasi sebesar Rp 4,070,516,604,00 atau terserap 99,33 persen.
 - b. Sub kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7,756,132,938,00 dengan realisasi sebesar Rp 7,665,223,039,00 atau terserap 98,83 persen.

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan Persentase rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diterbitkan. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup (PLH) beserta Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup. Indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup memiliki target pada tahun 2024 untuk adalah 33,17%, realisasi program sebesar 32,71%, sehingga capaian kinerja program sebesar 98,60%. Untuk indikator Persentase rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diterbitkan dengan target 77,92%, realisasi sebesar 78,17%, sehingga capaiannya sebesar 100,33%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 357,301,300,00 dengan realisasi sebesar Rp 354,729,523,00 atau sebesar 99,55 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah terdapat aplikasi SILALING yang mempermudah pemantauan secara tidak langsung / swapantau dan kesadaran dari perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam izin lingkungan, permohonan usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan dokumen lingkungan terus bertambah. Sementara itu faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah belum semua usaha/kegiatan melaksanakan pelaporan swapantau, dan penyesuaian sistem satu pintu terkait komunikasi dengan pemohon yang tidak langsung ke instansi teknis, pemohon yang tidak melampirkan nomor whatsapp sehingga susah untuk dihubungi terkait kekurangan data/informasi.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sama seperti pada anggaran program.

Kegiatan ini yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 302,660,300,00 dengan realisasi sebesar Rp 300,959,000,00 atau terserap 99,44 persen.

- b. Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 54,641,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 53,770,523,00 atau terserap 98,41 persen

E. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase Kampung ProKlim, Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata, dan Persentase Bank sampah yang aktif. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup. Target program pada tahun 2024 untuk indikator Persentase Kampung ProKlim adalah 62,13%, realisasi sebesar 65,09%, sehingga capaian kinerja sebesar 104,76%. Untuk indikator Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata dengan target 73,23%, realisasi sebesar 69,35% sehingga capaian sebesar 94,71%. Sementara itu untuk indikator Persentase Bank sampah yang aktif sebesar 60,00%, realisasi sebesar 79,92% sehingga capaian sebesar

123,20%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2,556,256,400,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,429,905,100,00 atau sebesar 95,06 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Penutupan TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan akhir sampah sehingga mendorong motivasi warga masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri, program pemerintah kota yogyakarta terkait zero sampah, pilah sampah soko omah, program pemerintah kota yogyakarta terkait organikkan Jogja, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kondisi lingkungan yang bersih, aman dan nyaman serta adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan kondisi bersih, aman dan nyaman. Sementara itu faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah indikator kampung proklam mencakup banyak aspek dan melibatkan kolaborasi beberapa instansi sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2,556,256,400,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,429,905,100,00 atau sebesar 95,06 persen.

F. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase sampah yang berkurang dan Persentase sampah yang tertangani. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Persampahan. Target program pada tahun 2024 untuk indikator Persentase sampah yang berkurang adalah 16,20%, realisasi sebesar 21,96%, sehingga capaian kinerja sebesar 135,55%. Untuk indikator Persentase sampah yang tertangani

dengan target 83,40%, realisasi sebesar 60,42% sehingga capaian sebesar 72,45%.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dukungan dari pemangku kebijakan mengenai program-program pengurangan sampah sejak dari rumah tangga. Sementara itu faktor penghambat sub kegiatan ini adalah kegiatan pengurangan sampah sejak dari sumbernya sudah dilakukan, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan diaktifkan kembali serta terjadinya penumpukan sampah di Depo/TPS karena keterbatasan kapasitas pengolahan sampah di UPS.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

a. Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 96,666,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 87,407,800,00 atau sebesar 90,42 persen.

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2,967,886,725,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,922,899,475,00 atau sebesar 64,79 persen.

c. Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 27,780,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 20,655,000,00 atau sebesar 74,35 persen.

d. Sub kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 96,666,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 87,407,800,00 atau sebesar 90.42 persen.

e. Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2.967.886.725,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.922.899.475,00 atau sebesar 64,79 persen.

- f. Sub kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 16,838,891,654,00 dengan realisasi sebesar Rp 16,720,729,605,00 atau sebesar 99.30 persen.
- g. Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 38,523,203,376,00 dengan realisasi sebesar Rp 35,441,839,520,00 atau sebesar 92,00 persen.
- h. Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 11.215.649.212,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.380.444.660,00 atau sebesar 92,55 persen.

G. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang dan 1 UPT, yaitu Sekretariat dan UPT Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perbengkelan. Target program pada tahun 2024 adalah A, realisasi yaitu A dengan sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, sedangkan faktor penghambatnya adalah dokumen bukti dukung cukup banyak dan belum terupdate.

Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 32,335,200,00 dengan realisasi sebesar Rp 32,129,200,00 atau sebesar 99,36 persen.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2,819,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,196,100,00 atau sebesar 77,90 persen.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 36,941,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 36,652,960,00 atau sebesar 99,22 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 20.449.756.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.869.242.440,00 atau sebesar 92,27 persen.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 553,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 553.000,00 atau sebesar 100 persen.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 707,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 707,000,00 atau sebesar 100 persen.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 542,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 538,500,00 atau sebesar 99,35 persen.

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2,456,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,408,500,00 atau sebesar 98,07 persen.
 - f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 469,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 469,000,00 atau sebesar 100 persen.
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 393,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 392,750,00 atau sebesar 99,94 persen.
 - h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 383,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 383,000,00 atau sebesar 100 persen.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 12,194,200,00 dengan realisasi sebesar Rp 12,073,000,00 atau sebesar 99,01 persen.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 393,785,795,00 dengan realisasi sebesar Rp 386,527,590,00 atau sebesar 98,16 persen.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Bengkel)
Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 78,817,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 78,807,950,00 atau sebesar 99,99 persen.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 11,687,500,00 dengan realisasi sebesar Rp 11,406,045,00 atau sebesar 97.59 persen.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 1.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.080.000,00 atau sebesar 60 persen.

- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 156,750,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 150,960,474,00 atau sebesar 96.31 persen.

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Bengkel)

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 1,936,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.936.000,00 atau sebesar 100 persen.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 3,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3,000,000,00 atau sebesar 100 persen.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 319,620,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 296,096,957,00 atau sebesar 92,64 persen.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 1,157,462,056,00 dengan realisasi sebesar Rp 1,157,378,973,00 atau sebesar 99,99 persen.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Bengkel)

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 237.744.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 237.744.000,00 atau sebesar 100 persen.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT Bengkel)

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 2,782,159,800,00 dengan realisasi sebesar Rp 2,582,693,730,00 atau sebesar 92,83 persen.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 112,652,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 112,256,050,00 atau sebesar 99,65 persen.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 400,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 395,868,720,00 atau sebesar 98,97 persen.

H. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator. Program ini menggunakan sumber dana Dana Keistimewaan DIY sehingga dalam pencapaian indikator program ini didukung oleh beberapa OPD. Kegiatan program ini yang dilaksanakan oleh DLH adalah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede. Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 9,130,100,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8,315,700,735, atau sebesar 91,08%.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

TABEL 2. 1 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023				
			Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Keuangan
3		4		Rp		Rp	%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	25.00%	474,565,000		453,914,800	95,65%
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							
1	Subkeg Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH dikabupaten/kota yang berisiarahan/muatan RPPLHkabupaten/kota danmengakomodir arahan RPPLHProvinsi	1 dokumen	357,600,000	1 dokumen	355,988,800	99,55%
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen				
2	Subkeg Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	113,465,000	2 dokumen	97,926,000	86,31%
Rata-rata capaian kinerja						95,27%	92,93%
Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	75,50%	3,227,945,910		3,184,685,246	98.65%
		Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU	52,63%				
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen				
		Jumlah pengujian yangdilaksanakan oleh laboratoriumlingkungan	2 dokumen				

1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	205,086,200	3 dokumen	203,614,516	99.28%
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 dokumen	562,638,970	2 dokumen	560,664,135	99.65%
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	5 kegiatan				
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	5 kegiatan	216,943,100	5 kegiatan	177,660,205	81.89%
4	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	320,400 m2	2,243,277,640		2,242,746,390	99.98%
Rata-rata capaian kinerja						99,74%	95,20%
Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				11,854,122,873		11,735,739,643	99,15%
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola	2.76 Ha				
		Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola	76.7 Ha				
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	4,097,989,935	100%	4,097,516,604	99,33%
			0.00%		100%		
	2.88 Ha	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00%		100%		
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		100%	7,756,132,938	99.99%	7,665,223,039	98,83%
		Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00%		99.99%		
	76.7 Ha	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00%		99.99%		
Rata-rata capaian kinerja						100,00%	99,08%
Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup	33,17%	453,990,300		354,729,523	78,14%
		Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	77,92%				
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	215 dokumen				
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	56 dokumen	355,042,500	56 dokumen	344,348,000	96.99%
2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 laporan	38,125,778	24 laporan	37,964,185	99.58%
Rata-rata capaian kinerja						99,86%	98,92%
Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Kampung ProKlim	62,13%	2.556.256.400	99,32%	2.429.905.100	95,06%
		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	73,23%				
		Persentase Bank Sampah yang aktif	60,00%				
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	15 lembaga				
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/Lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	15 lembaga	4,073,558,000	15 lembaga	3,672,624,450	95,06%
Rata-rata capaian kinerja						99,32%	95,06%
Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah yang berkurang	16,20%	69.077.598.217		65.845.950.621	95,32%
		Persentase sampah yang tertangani	83,40%				
Kegiatan Pengelolaan Sampah		Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaaur ulang dan pemanfaatan kembali	8 laporan				
		Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta	284.35 ton/hari				
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		1.393.930.000		1.262.522.811	90,57%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	100.01%	16.838.891.654	100.01%	16.720.720.605	99.30%
3	Penyusunan Rencana, Kebijakandan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		100.00%	27.780.000	98.46%	20.655.000	74,35%
		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen		98.46%		
4	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota			96.666.500		87.407.800	90,42%
5	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pendaauran Ulang Kembali						
		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		13.590.750		9.460.750	69,61%
	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	100.00%		99.15%		

6	Penanganan sampah melaluipemrosesan akhir sampah diTPA/TPST kabupaten/kota atauTPA/TPST Regional		100.00%	11.215.649.212	78.70%	10.380.444.660	92,55%
		Jumlah sampah yang tertanganimelalui pemrosesan akhirsampah diTPA/TPSTkabupaten/kota atauTPA/TPST Regional					
	284.35 ton/hari						
			0.00%		99.99%		
	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasaranapenanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		2.967.886.725		1.922.899.475	64,79%
	Penanganan sampah melaluipemilahan dan pengolahansampah di instalasi pengolahansampah TPS3R, PDU, TPST,TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF,pusat pengomposan, biodigester,Bank Sampah dan fasilitaslainnya sesuai dengan peraturanperundangan	Jumlah sampah yang tertanganimelalui proses pemilahan danpengolahan sampah di instalasipengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan,biodigester, Bank sampah danfasilitas lainnya sesuai denganperaturan perundangan		36.523.203.376		35.441.839.520	97,04%
Rata-rata capaian kinerja						93,27%	84,20%
Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				26,567,912,735		24,547,458,089	92.40%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	28 dokumen				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	32.335.200	4 dokumen	32.129.200	99,36%
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	2.819.000	4 dokumen	2.196.100	93.51%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 laporan	36.941.500	21 laporan	36.652.960	99,22%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	1255 dokumen				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	20,449.756.800	orang/bulan	18.869.242.440	92.27%
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	553,000	12 dokumen	553,000	100%

6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 dokumen	707.000	1200 dokumen	707.000	100.00%
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	542.000	12 dokumen	538.500	99,35%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	2.456.000	12 laporan	2.408.500	98,07%
9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 dokumen	469.000	6 dokumen	469.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	393.000	12 laporan	392.750	100%
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	383,000	1 dokumen	383.000	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	5 laporan				
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	12.194.200	1 paket	12.194.200	100.00%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	393.785.795	7 paket	464.635.540	117,99%
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel 5 laporan (1 paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00%	78.817.500	99.43%	464.635.540	
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	11.687.500	2 paket	11.406.045	97,59%
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.800.000	1 dokumen	1.080.000	60,00%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	156.750.000	2 laporan	153.006.474	97,61%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.936.000	12 laporan		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan				
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000,000	100.00%
20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	319.620.000	4 laporan	296.096.957	92,64%
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	1.157.462.056	4 laporan	1.395.122.973	%
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	237,744,000	12 laporan	237,744,000	100.00%

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai	150 unit				
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	141 unit	2.782.159.800		2.528.693.730	92,83%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.00%		92.00%		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai	150 unit				
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	112.652.000	2 unit	112.256.050	99,65%
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00%	400.000.000	100.00%	395.868.720	98,97%
	3 unit (1 unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00%		100.00%		
Rata-rata capaian kinerja						95,27%	92,93%
Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

TABEL 2. 2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024																						
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:																						
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	30,93 %																			
2	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99.60 %																			
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	B																			
No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2024		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	A	0,00	A	0,00	A	26.196.964.351,00	A	26.196.964.351,00	A	24.373.501.939,00	100%	100,72%					Lusiningsih, S.E, M.Si	
	PerencanaanPenganggaranandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		32.335.200,00	100,00%	32.335.200,00	100,00%	32.129.200,00	100,00%	99,36%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00		0,00		2.819.000,00	100,00%	2.819.000,00	100,00%	2.196.100,00	100,00%	77,90%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		36.941.500,00	100,00%	36.941.500,00	100,00%	36.652.960,00	100,00%	99,22%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		0,00		20.449.756.800,00	100,00%	20.449.756.800,00	100,00%	18.869.242.440,00	100,00%	92,27%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		210 orang perbulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00		0,00		553.000,00	100,00%	553.000,00	100,00%	553.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		707.000,00	100,00%	707.000,00	100,00%	707.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1.800 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00		0,00		542.000,00	100,00%	542.000,00	100,00%	538.500,00	100,00%	99,35%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		0,00		2.456.000,00	100,00%	2.456.000,00	100,00%	2.408.500,00	100,00%	98,07%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		469.000,00	100,00%	469.000,00	100,00%	469.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			0,00		0,00		393.000,00	100,00%	393.000,00	100,00%	392.750,00	100,00%	99,94%						

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 laporan		0 laporan	12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0,00		0,00	383.000,00	100,00%	383.000,00	100,00%	383.000,00	100,00%	100,00%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00		0,00	12.194.200,00	100,00%	12.194.200,00	100,00%	12.073.000,00	100,00%	99,01%							
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00		0,00	393.785.795,00	100,02%	393.785.795,00	100,02%	386.527.590,00	100,00%	98,16%							
		14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Paket	0,00		0,00	78.817.500,00	100,00%	78.817.500,00	100,00%	78.807.950,00	100,00%	99,99%							
		15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0,00		0,00	11.687.500,00	100,00%	11.687.500,00	100,00%	11.406.045,00	100,00%	97,59%							
		16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Kegiatan	0,00		0,00	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%	60,00%							
		17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Kegiatan	0,00		0,00	156.750.000,00	100,00%	156.750.000,00	100,00%	150.960.474,00	100,00%	96,31%							
		18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00		0,00	1.936.000,00	100,00%	1.936.000,00	100,00%	1.936.000,00	100,00%	100,00%							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Kegiatan	0,00		0,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%							
		20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Kegiatan	0,00		0,00	319.620.000,00	100,00%	319.620.000,00	100,00%	296.096.957,00	100,00%	92,64%							
		21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00		0,00	1.157.462.056,00	100,00%	1.157.462.056,00	100,00%	1.157.378.973,00	100,00%	99,99%							
		22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0 Laporan	0,00		0,00	237.744.000,00	100,00%	237.744.000,00	100,00%	237.744.000,00	100,00%	100,00%							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Jumlah kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0 Unit	0,00		0,00	2.782.159.800,00	100,00%	2.782.159.800,00	92,78%	2.582.693.730,00	92,78%	92,83%							
		24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Kegiatan	0,00		0,00	112.652.000,00	100,00%	112.652.000,00	100,00%	112.256.050,00	100,00%	99,65%							
		25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan			0,00		0,00	400.000.000,00	100,00%	400.000.000,00	100,00%	395.868.720,00	100,00%	98,97%							

		Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		100,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															99,71%	96,05%							
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	(Jumlah Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang telah dicapai dibagi Jumlah seluruh Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota) dikali 100%	100,00 %	0,00	25,00 %	0,00	50,00 %	471.065.000,00	50% %	471.065.000,00	75% %	453.914.800,00	150%	96,36%						Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M	
			Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	(Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi dibagi jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasi) dikali 100%	100,00 %	0,00	0,00	0,00	66,67 %	0,00	66.67%	0,00	100.00%	0,00	149,99%	0,00%						Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M	
			Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	(Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi dibagi jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasi) dikali 100%	66,00	0,00		0,00	66,67 %	0,00	66.67%	0,00	100.00%	0,00	149,99%	0,00%							
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)Kabupaten/Kota																							
		1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			0,00		0,00		357.600.000,00	100,00%	357.600.000,00	100,00%	355.988.800,00	100,00%	99,55%							
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Kabupaten/Kota																							
		2	Pemantauan dan Evaluasi KLHS			0,00		0,00		113.465.000,00	100,00%	113.465.000,00	90,53%	97.926.000,00	90,53%	86,31%							
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00%		90,53%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															95,27%	92,93%							
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	(30% Persemtase kebersihan sungai yang terpelihara + 70% Persentase Inventarisasi sumber pencemar) x 100%	77,83 %	0,00	0,00 %	0,00	75,50 %	3.227.945.910,00	75.50% %	3.227.945.910,00	75.50% %	3.184.685.246,00	100%	98,66%						Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M	
			Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan	(Jumlah hasil pemantauan air dan udara yang		0,00		0,00	52,63 %	0,00	52.63%	0,00	53.51%	0,00	101,67%	0,00%						Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M	

	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang berkurang	(Jumlah sampah yang berkurang dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%	19,20 %	0,00	19,29 %	0,00	16,20 %	71.077.598.217,00	16,20% %	71.077.598.217,00	21,96% %	65.845.959.621,00	135,55%	92,64%						Bidang Pengelolaan Persampahan	
			Persentase sampah yang tertangani	(Jumlah sampah yang tertangani dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%	80,50 %	0,00	80,54 %	0,00	83,40 %	0,00	83,40%	0,00	60,42%	0,00	72,80%	0,00%						Bidang Pengelolaan Persampahan	
		Pengelolaan Sampah																					
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			0,00		0,00		27.780.000,00	100,00%	27.780.000,00	98,46%	20.655.000,00	98,46%	74,35%							
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		98,46%		98,46%								
		2	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota			0,00		0,00		96.666.500,00	100,00%	96.666.500,00	97,32%	87.407.800,00	97,32%	90,42%							
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		97,32%		97,32%								
		3	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah			0,00		0,00		2.967.886.725,00	100,01%	2.967.886.725,00	65,15%	1.922.899.475,00	65,14%	64,79%							
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		0 Unit		0 Unit		72 Unit		0,00%		65,15%		0,00%								
		4	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			0,00		0,00		38.523.203.376,00	100,04%	38.523.203.376,00	94,78%	35.441.839.520,00	94,74%	92,00%							
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		0 Ton		0 Ton		123,181 Ton		0,00%		5,20%		0,00%								
		5	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah			0,00		0,00		13.590.750,00	100,00%	13.590.750,00	97,92%	9.460.750,00	97,92%	69,61%							
			Jumlah sampah yang terdaur ulang		0 Ton		0 Ton		15.000 Ton		100,00%		97,92%		97,92%								
		6	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			0,00		0,00		11.215.649.212,00	100,00%	11.215.649.212,00	92,54%	10.380.444.660,00	92,54%	92,55%							
			Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		0 Ton		0 Ton		81,863 Ton		0,00%		92,54%		0,00%								
		7	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			0,00		0,00		1.393.930.000,00	100,00%	1.393.930.000,00	100,00%	1.262.522.811,00	100,00%	90,57%							
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 Kelompok		0 Kelompok		27 Kelompok		0,00%		100,00%		0,00%								
		8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			0,00		0,00		16.838.891.654,00	100,00%	16.838.891.654,00	100,00%	16.720.729.605,00	100,00%	99,30%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		0,00%		100,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															93,27%	84,20%							
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi							

		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) / (Total kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) x 100%	100,00 %	0,00	0,00	100,00 %	9.130.100.000,00	2 Dokumen %	9.130.100.000,00	100,00 %	8.315.700.735,00	100%	91,08%						Ahmad Haryoko, S.E, M.Si
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																					
		1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede				0,00		0,00		9.130.100.000,00	100,00%	9.130.100.000,00	100,00%	8.315.700.735,00	100,00%	91,08%					
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		0,00%			89,21%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	91,08%						
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Total anggaran dari seluruh program										124.871.354.051,00		124.871.354.051,00		116.694.136.607,00							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)															98,39%	93,45%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: "1. Pemangku kebijakan memberikan dukungan melalui koordinasi dan diskusi secara rutin untuk melakukan penanganan sampah secara cepat 2. adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan belanja sarana dan prasarana pengolahan sampah" 3. Adanya kegiatan pengelolaan sampah mandiri yang didampingi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 4. Adanya dukungan dari pemangku kebijakan maupun OPD terkait untuk memecahkan masalah sampah di Kota Yogyakarta 5. Keberadaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dilengkapi dengan mesin pengolah sampah dapat mempercepat proses pemilahan dan pengolahan sampah" 6. Peningkatan luasan RTH masih terus dilakukan. 7. Pelaporan IKL secara berkala." 8. Pemantauan kualitas udara menggunakan metode passive sampler dan bekerjasama dengan tenaga ahli dalam analisa hasil pemantauan sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas udara di Kota Yogyakarta. 9. Pembangunan RTHP dan jalur hijau sebagai penyerap polutan" 10. Bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi dan tenaga ahli dalam analisa hasil pemantauan sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta.																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: 1. sampah yang sudah lama menumpuk di Depo / TPS berpotensi menimbulkan bau tidak sedap 2. terjadinya penumpukan sampah di Depo/TPS yang belum terangkut" 3. Kegiatan pengelolaan sampah mandiri masih perlu ditingkatkan agar kegiatan dapat konsisten dan lebih berinovasi 4. skema pengelolaan sampah masih sangat dinamis, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam terkait pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta 5. Penumpukan sampah di Depo/TPS belum semua dapat terolah karena kapasitas UPS masih terbatas" 6. Tutupan vegetasi beresiko alih fungsi menjadi non vegetasi. 7. Tutupan vegetasi yang sudah dipetakan berada di lahan persil yang kewenangannya ada di masing-masing pemilik lahan. 8. Belum adanya regulasi yang lebih mengikat untuk penyediaan RTH terutama di lahan privat. " 9. Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan sebagai penyerap polutan di wilayah Kota Yogyakarta 10. Terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi sehingga mempengaruhi penurunan kualitas udara." 11. Masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. 12. Dari 8 parameter uji yang dipersyaratkan dalam perhitungan IKA, terdapat 2 parameter dominan yaitu Fecal Coliform dan Total Fosfat yang selalu melebihi baku mutu dan konsentrasinya tinggi, hal tersebut berdampak pada nilai IKA. "																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			: agar perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat bersinergi dan harmonis pada tatakala yang telah disusun, dan berdasarkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi capaian kinerja perangkat daerah baik fisik maupun keuangan.																		
												Yogyakarta, 2025				Yogyakarta, 2025					
												Disusun oleh Kepala DINAS LINGKUNGAN HIDUP				Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
												Drs. Sugeng Darmanto NIP. 196501221992031005				Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004					

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Lingkungan Hidup, 7 (tujuh) program yang terdiri dari Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Persampahan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja program dan 11 (sebelas) kegiatan, 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan 45 (empat puluh tiga) indikator kinerja sub kegiatan;
 - b. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 11 (sebelas) indikator yang melampaui target, termasuk 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
 - c. Dari 45 (empat puluh tiga) indikator kinerja sub kegiatan, 32 (tiga puluh dua) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 7 (tujuh) program dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja program dan 11 (sebelas) kegiatan, 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan 45 (empat puluh lima) indikator kinerja sub kegiatan;
 - b. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan semua indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan

- c. Dari 45 (empat puluh lima) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan semua memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah pelayanan urusan lingkungan hidup, yang meliputi:

1. Permohonan arahan dokumen lingkungan (penapisan)
2. SPPL
3. Rincian teknis penyimpanan limbah B3
4. Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah
5. Persetujuan teknis pembuangan emisi;
6. Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3
7. Surat kelayakan operasional sistem pengolahan air limbah atau fasilitasi injeksi
8. Surat kelayakan operasional alat pengendali emisi
9. Surat kelayakan operasional pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3
10. Rekomendasi persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup
11. Rekomendasi keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib amdal
12. Rekomendasi persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup
13. Rekomendasi persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup
14. Rekomendasi teknis izin penebangan pohon dan pemindahan taman
15. Rekomendasi teknis armada angkutan sampah
16. Rekomendasi teknis usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga/sampah domestik
17. Retribusi kebersihan masyarakat

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian kualitas lingkungan hidup yang tercantum dalam Kepwal Yogyakarta No. 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan yang tercantum dalam Kepwal Yogyakarta No. 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang tercantum dalam Kepwal Yogyakarta No. 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

TABEL 2. 3 PENCAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra (%)				Realisasi (%)	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024
Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	54.66	62,20	65,71	66,41	52.06	62,60

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99.60	99.60	99.70	99.70	99.84	82,38
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	A Nilai	A Nilai

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup memiliki 1 indikator kinerja yaitu Capaian Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 62,20% telah dapat melampaui target dimana realisasi sebesar 62,60%. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Capaian Pengelolaan Persampahan, realisasinya sebesar 82,38% dari target sebesar 99,60%; dan tujuan Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah dapat melampaui target dimana realisasinya A dari target B.
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup memiliki indikator kinerja yaitu Capaian Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 62,20% dengan realisasi sebesar 62,60% dengan capaian kinerja sebesar 100,64%. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Capaian Pengelolaan Persampahan dimana realisasinya sebesar 82,38% dari target sebesar 99,60%; dan sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja, yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat telah dapat melampaui target dimana realisasinya A dari target B, dengan capaian kinerja sebesar 124,68%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Kadar *fecal coli*, total coliform, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu akibat sebagian besar masyarakat yang berada di pinggiran sungai membuang limbah domestiknya ke dalam sungai.
2. Peningkatan pemantauan sumber pencemar pada air sungai yang disebabkan oleh limbah domestik dan air tanah.
3. Peningkatan inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim.
4. Wilayah Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan untuk menambah tutupan vegetasi/penghijauan.
5. Benturan kepentingan antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup atau dengan antar Perangkat Daerah seperti penebangan pohon in gang oleh warga untuk kepentingan warga tersebut atau penebangan pohon di jalur divider untuk pelebaran jalan.
6. Masyarakat masih belum berperilaku 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan masih kurang tertib dalam hal jadwal pembuangan sampah yang tidak pada

tempatnya terutama pengunjung dari luar kota sehingga adanya komitmen untuk optimalisasi edukasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait pengelolaan sampah.

7. Tertahannya sampah rumah tangga di rumah penduduk, depo, atau TPS, sehingga tidak sedikit masyarakat yang kerap membakar sampah.
8. Adanya penolakan warga atas keberadaan Unit Pengelola Sampah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal warga.
9. Terbentuknya strategi pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta pasca adanya Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah DIY.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Partisipasi dan peran aktif masyarakat yang rendah dengan optimalisasi edukasi kepada masyarakat terkait kepedulian terhadap kebersihan sungai dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
2. Mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dari hulu sampai hilir sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta dengan wilayah yang sempit namun kepadatan penduduk tinggi.
3. Masyarakat Kota Yogyakarta heterogen dengan mobilitas tinggi dan menjadi salah satu tujuan wisata.
4. Pertumbuhan ekonomi dengan investasi tinggi.

Sedangkan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasannya adalah dengan:

1. Regulasi dan kebijakan yang mendukung masterplan pengelolaan sampah.
2. Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Kesempatan SDM aparatur meningkatkan kompetensi dan kapasitas.
4. Pendanaan dari CSR dan sumber lain.
5. Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, tujuan wisata, kota pendidikan dan budaya.
6. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja yang berperan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah dalam rumah tangga dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan yang difasilitasi oleh fasilitator kelurahan (faskel) dan Forum Bank Sampah dan melakukan pendampingan terhadap 691 bank sampah. Selain itu, melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap Bank Sampah, dan melakukan optimalisasi fungsi Unit Pengelola sampah (UPS).

Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum cukup signifikan menurunkan permasalahan sampah dan adanya penolakan warga atas keberadaan UPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya dapat dilakukan upaya yaitu dengan melaksanakan pemeliharaan kebersihan meliputi penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada penggal jalan di wilayah Kota Yogyakarta serta pemeliharaan TPS/depo/landasan container disertai dengan pengawasan.

2. Kebiasaan masyarakat membuang limbah domestiknya ke dalam sungai dan memelihara ternak di sepanjang pinggiran sungai yang dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta dapat dilakukan upaya seperti melaksanakan pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan dan kualitas air sungai yang dapat dilakukan dengan Kerja Bakti rutin untuk membersihkan sungai dan Gerakan Bersih Sungai (GBS). Selain itu, menerapkan sanksi sesuai perundangan yang berlaku terhadap pelanggar pengelolaan lingkungan dan dilaksanakan dengan adanya koordinasi bersama instansi terkait seperti Satpol PP. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Bappeda, Dinas PUPKP, Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Kewilayahan, dll mengenai pembangunan perkotaan yang berdampak terhadap lingkungan.
3. Keterbatasan lahan Wilayah Kota Yogyakarta untuk penghijauan dapat dilakukan upaya seperti memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat digunakan untuk menambah

luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota yang berada di wilayah permukiman dan lahan ruang terbuka hijau privat serta meningkatkan jumlah penanaman pohon di sepanjang jalur hijau dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menindaklanjuti pembangunan fisik RTHP untuk tanah-tanah yang dapat distatusfungsikan dan dimanfaatkan sebagai RTHP berdasarkan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026 adalah “Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta” dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam ... (...) sasaran daerah, yaitu:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;
6.;
7.;
8.;
9.;
10.; dan
11.;

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 6 dan 10, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut

TABEL 2. 4 RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Dinas Lingkungan Hidup						110.292.320.136,00							0,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						110.292.320.136,00							0,00						
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						110.292.320.136,00							0,00						
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	-A Nilai			-A Nilai	23.344.322.464,00						-	0,00						
	2	11	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	-28dokumen			-28 dokumen	57.295.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	17.535.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.819.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	36.941.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22.169.209.100,00			-	-	-		0,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				166 Orang/bulan	22.162.819.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	395.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3000 Dokumen	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	960.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	275000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	627.440.200,00			-	-	-		0,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	21.589.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	411.455.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	18.345.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	148.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			0 laporan	2.514.804,00							0,00	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	128.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	2.385.054.664,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	316.824.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	116.824.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	392.545.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	101.435.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	02	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	101.435.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	291.110.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS														
							<i>Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi</i>				3 Dokumen	291.110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	2.598.336.200,00			-	-	-		0,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	415.367.500,00			-	-	-		0,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				0 Dokumen	314.810.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	<i>Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK</i>				1 Dokumen	100.557.100,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-			
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	2.182.968.700,00			-	-	-		0,00	
	2	11	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
							<i>luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>				320400 M2	1.996.319.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota															
							<i>jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota</i>					5 Kegiatan	186.649.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	15.187.529.005,00			-	-	-		0,00		
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	15.187.529.005,00			-	-	-		0,00		
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
							<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					2.96 Ha	7.378.685.305,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya															
							<i>Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					2 Unit	7.808.843.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	30.662.500,00			-	-	-		0,00		
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	30.662.500,00			-	-	-		0,00		

	2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				0 Dokumen	30.662.500,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	
5	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	516.234.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-			-	516.234.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				0 Dokumen	464.373.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

								<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				0 Badan Usaha	51.861.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-				-	1.726.749.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	1.726.749.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat															
							<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>					15 Lembaga	1.726.749.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-				-	66.495.941.967,00			-	-	-		0,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-				-	66.495.941.967,00			-	-	-		0,00	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan															
							<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>					27 Kelompok	1.143.846.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan															

							<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada</i>				0 Dokumen	28.062.432.388,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
							<i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan</i>				1 Dokumen	24.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
							<i>Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota</i>				1 Dokumen	406.211.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah														
							<i>Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik</i>				0 Unit	4.134.853.375,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
							<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>				0 Ton	20.792.436.460,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														

								jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				0 Ton	11.931.681.994,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							UPT Laboratorium Lingkungan						1.067.804.540,00							0,00		
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.067.804.540,00			-	-	-		0,00		
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.067.804.540,00			-	-	-		0,00		
8	2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-					1.067.804.540,00			-	-	-		0,00		
	2	11	03	2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				100 %	1.067.804.540,00			-	-	-		0,00		
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																
								jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	1.067.804.540,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	
							UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan						3.834.170.300,00							0,00		
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.834.170.300,00			-	-	-		0,00		
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3.834.170.300,00			-	-	-		0,00		
9	2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					3.834.170.300,00			-	-	-		0,00		
	2	11	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	70.787.000,00			-	-	-		0,00		

	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material															
							<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>					1 Paket	70.787.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>					16 Laporan	1.936.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				12 laporan	237.744.000,00			-	-	-		0,00	
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	237.744.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.525.639.300,00				-	-	-		0,00	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>					28 Unit	298.757.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>					152 unit	3.226.881.800,00			-	-	-			
	J U M L A H												115.194.294.976,00							0,00	

2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Hasil pencermatan usulan musrenbang kecamatan yang dapat diakomodir dalam perencanaan dan penganggaran di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel Tabel 2.4 berikut ini.

TABEL 2. 5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 (UNTUK PERENCANAAN 2026)

No.	Kelurahan	Usulan Kegiatan	Uraian Kegiatan
1.	Pakuncen	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) (Lahan kosong milik Pemkot belum terbangun RTHP, sudah ada DED) V = 1 titik, A = belum ada rincian
2.	Gunungketur	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	kurangnya pengendalian pertumbuhan tanaman dalam fase generatif maupun fase vegetatif. V: ukuran 17x12meter A: Rp25.000.000,-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93N);

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2026 adalah ***“Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan”*** (*masih tentative*). Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai fungsi meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2026, yaitu **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada Berbagai Tingkatan, dan
6. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2026 adalah: ***“Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta”***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan Pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta;
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

TABEL 3. 1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026, yaitu "....." dengan indikator tujuan ".....".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu "....." dengan indikator sasaran ".....".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

TABEL 3. 2 TARGET RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	%	65,71	66,51	67,11	67,71	68,32
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur	Capaian Pengelolaan Persampahan	%	85,62	86,32	87,02	87,72	88,42
3.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	poin					

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2026 terdiri dari 8 rumusan program, 14 rumusan kegiatan, dan 47 rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub

kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 115,194,294,976,00 (Seratus Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 281.100.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 101.435.000,00.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 101.435.000,00

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp Rp 291,110,000.00.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Pemantauan dan Evaluasi KLHS, dengan anggaran Rp 291,110,000.00

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.666.140.740,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH), Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan UPT. Laboratorium Lingkungan terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.483.172.040,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan anggaran Rp 314.810.400,00
 - 2) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, dengan anggaran Rp 100.557.100,00
 - 3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota (UPT Laboratorium Lingkungan), dengan anggaran Rp 1.067.804.540,00
 - b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.182.968.700,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 1.996.319.600,00
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 186.649.100,00
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.187.529.005,00
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp Rp 15.187.529.005,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan anggaran Rp 7.378.685.305,00
 - 2) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, dengan anggaran Rp 7.808.843.700,00
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 30.662.500,00
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
- a. Penyimpanan sementara Limbah B3
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 30.662.500,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), dengan anggaran Rp 30.662.500,00
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 516.234.000,00
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 516.234.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
- 1) Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, dengan anggaran Rp 464.373.000,00

2) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 51.861.000,00

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.726.749.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.726.749.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat, dengan anggaran Rp 1.726.749.000,00

7. Program Pengelolaan Persampahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 66.495.941.967,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Persampahan (PP), terdiri dari 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sampah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 66.495.941.967,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp 1.143.846.250,00

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp 28.062.432.388,00
- 3) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 24.480.000,00
- 4) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota, dengan anggaran Rp 406.211.500,00
- 5) Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah, dengan anggaran Rp 4.134.853.375,00
- 6) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, dengan anggaran Rp 20.792.436.460,00
- 7) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional, dengan anggaran Rp 11.931.681.994,00

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 27.178.492.764,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekertariat dan UPT. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perbengkelan, terdiri dari 5 kegiatan dan 26 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 57.295.800,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 17.535.300,00
- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2,819,000.00
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 36,941,500.00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 19.827.957.800,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 19,821,567,800,00
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 545.000,00
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 990,000.00
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 960,000.00
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 1,680,000.00
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 1,150,000.00
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 790.000,00
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran, dengan anggaran Rp 275.000,00

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 698.227.200,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 21,589,000,00
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 411.455.700,00
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 18.345.500,00
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 12800,000.00
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 174,850,000,00
- 6) Penyediaan Bahan/Material, dengan anggaran Rp 68.851.000,00
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 1,936,000

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.752.548.664,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 128.250.000,00
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 2.385.054.664,00
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 237,744,000

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.842.463.300,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 116,824,000,00

- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 200,000,000.00
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan), dengan anggaran Rp 298.757.500,00
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan), dengan anggaran Rp 3.226.881.800,00

3.4 Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utama Gender yang Menyasar 5 Kelompok Rentan

Program Pengarus Utama Gender di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah diterapkan pada beberapa program yaitu pada program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dilaksanakan oleh kelompok substansi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup (PSDLH). Tugas pokok dan fungsi kegiatan PSDLH adalah untuk melaksanakan pengembangan kapasitas masyarakat yang peduli lingkungan hidup dengan program kepedulian di masyarakat, yaitu di dunia pendidikan (sekolah-sekolah) dan di wilayah (kampung-kampung). Pencapaian target dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti Program Adiwiyata, Adipura, Program Kampung Iklim (PROKLIM), pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah (tingkat Kelurahan, Kemantren dan Kota), pemberian penghargaan kepada pelopor peduli lingkungan, dan publikasi informasi lingkungan hidup melalui berbagai media. Sasaran kegiatan adalah seluruh masyarakat Kota Yogyakarta baik dilingkup sekolah maupun warga di Kota Yogyakarta, dengan didukung penyediaan sarana-prasarana ramah lingkungan yang

dapat dimanfaatkan oleh semua warga terutama kelompok rentan (pria, wanita, anak-anak, lansia, fakir miskin dan difabel).

Program selanjutnya yang memperhatikan 5 kelompok rentan yaitu pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati khususnya pada kelompok substansi Ruang Terbuka Hijau Publik. RTHP adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jumlah RTHP di Kota Yogyakarta tahun 2024 sebanyak 64 RTHP. Sebagian besar sarana dan prasarana pada RTHP di Kota Yogyakarta mudah diakses dan ramah terhadap kelompok rentan (anak, perempuan, lansia, difabel, fakir miskin). Terdapat 4 RTHP di Kota Yogyakarta yang memiliki fasilitas sarana prasarana yang ramah terhadap 5 kelompok rentan tersebut meliputi RTHP Gajahwong Edu Park, RTHP Bakung, RTHP Taman Broto, dan RTHP Kepuh. Selain itu, sarana prasarana di RTHP Kota Yogyakarta juga dapat dimanfaatkan oleh semua warga tak terkecuali kelompok rentan seperti pada pendopo, fasilitas bermain anak, toilet, penghijauan, tempat sampah pilah, komposter, lapangan olahraga dan sarana fitness outdoor di beberapa tempat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta tahun 2026 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan indikator sasaran
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku
8. Penyusunan perencanaan Rancangan Awal Rencana Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Pengarus Utamaan Gender yang menyasar 5 Kelompok Rentan yang merupakan penerapan GAP/GBS.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan

6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2026.